



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : R- **222** /MA/OT.00/6/2021

03 Juni 2021

Sifat : Rahasia

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Usulan Satuan Kerja/UPT Berpredikat WBK dan WBBM
pada Kementerian Agama Tahun 2021

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
Jakarta

Dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Agama melalui Tim Penilai Internal (TPI) telah melaksanakan penilaian pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Penilaian diawali dengan penilaian pendahuluan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I Pusat dengan jumlah usulan satker-satker yang layak dilakukan penilaian TPI sebanyak 75 satuan kerja/UPT;
2. Selain pada 75 satuan kerja/UPT tersebut, TPI Kementerian Agama juga telah melakukan penilaian terhadap 9 satuan kerja/UPT yang telah mendapat predikat WBK untuk mengetahui kemajuan dan kelayakannya meraih predikat WBBM;
3. Dalam memenuhi nilai survey pada komponen hasil, TPI menggunakan hasil survey persepsi korupsi dan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pelatihan dan Pendidikan Kementerian Agama;
4. Hasil penilaian terhadap 75 satuan kerja/UPT calon pilot project WBK dan 9 satuan kerja/UPT calon pilot project WBBM, terdapat 49 satuan kerja/UPT (65,33%) layak WBK, dan 5 satuan kerja/UPT (55,56%) layak WBBM.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengusulkan agar satuan kerja/UPT berikut dapat dilakukan penilaian lebih lanjut oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dan dipertimbangkan sebagai satuan kerja/UPT berpredikat WBK dan WBBM, yaitu:

A. Satuan Kerja/UPT Pilot Project WBK

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah;
2. Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Prov. Jawa Timur;
3. Kantor Kementerian Agama Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah;
4. Kantor Kementerian Agama Kab. Gianyar, Prov. Bali;
5. Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Prov. Sumatera Barat;
6. Kantor Kementerian Agama Kab. Badung, Prov. Bali;
7. Kantor Kementerian Agama Kab. Malang, Prov. Jawa Timur;
8. Kantor Kementerian Agama Kab. Pekalongan, Prov. Jawa Tengah;
9. Kantor Kementerian Agama Kab. Jembrana, Prov. Bali;
10. Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Selatan, Prov. Kepulauan Bangka Belitung;
11. Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta;

12. Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah;
 13. Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah;
 14. Kantor Kementerian Agama Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah;
 15. Kantor Kementerian Agama Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah;
 16. Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh, Prov. Sumatera Barat;
 17. Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Selatan, Prov. Selatan Sumatera Barat;
 18. Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara;
 19. Kantor Kementerian Agama Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
 20. Kantor Kementerian Agama Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau;
 21. Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah;
 22. Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah;
 23. Kantor Kementerian Agama Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 24. Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah;
 25. Kantor Kementerian Agama Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah;
 26. Kantor Kementerian Agama Kab. Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 27. Asrama Haji Embarkasi Makassar, Prov. Sulawesi Selatan;
 28. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Jakarta, Prov DKI. Jakarta;
 29. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung, Prov. Jawa Barat;
 30. Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Prov. Jawa Barat;
 31. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Prov. Jawa Tengah;
 32. Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, Prov. Sulawesi Selatan;
 33. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Prov. Jawa Tengah;
 34. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Prov. Jawa Timur;
 35. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendikia Jambi, Prov. Jambi;
 36. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendikia Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara;
 37. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendikia Sambas, Prov. Kalimantan Barat;
 38. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 39. MAN 1 Kota Bukittinggi, Prov. Sumatera Barat;
 40. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta, Prov. DKI Jakarta;
 41. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendikia Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
 42. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
 43. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 44. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Salatiga, Prov. Jawa Tengah;
 45. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendikia Gowa, Prov. Sulawesi Selatan;
 46. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang, Prov. Jawa Timur;
 47. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kudus, Prov. Jawa Tengah;
 48. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Jepara, Prov. Jawa Tengah; dan
 49. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendikia Serpong, Prov. Banten.
- B. Satuan Kerja/UPT Pilot Project WBBM
1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali;
 2. IAIN Salatiga, Prov. Jawa Tengah;
 3. Kankemenag Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat
 4. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang, Prov. Jawa Tengah; dan
 5. Kantor Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai bahan pertimbangan Saudara bersama ini kami lampirkan Laporan TPI tentang Hasil Penilaian Pembangunan ZI-WBK/WBBM kementerian Agama Tahun 2021.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Menteri Agama
Republik Indonesia,

A Yaqut Cholil Qoumas 71



Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal; dan
3. Para Kepala Badan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan RS Fatmawati Nomor 33A Cipete Jakarta 12420 Po. Box 3867

Telepon (021) 75916038, 7697853, 7691849

Faksimile (021) 7692112 Website www.itjen.kemenag.go.id

Nomor : R-455/IJ/PS.01.6/05/2021 19 Mei 2021
Sifat : Penting
Lampiran : Empat Bundel
Hal : Laporan Hasil Penilaian Pembangunan
ZI-WBK/WBBM Kemenag Tahun 2021

Yth. Menteri Agama RI
Jakarta

Dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Agama, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan penilaian pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2021. Sehubungan dengan itu, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan penilaian sebagai berikut:

1. Percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan ZI-WBK/WBBM merupakan pilar utama untuk mewujudkan arah kebijakan tujuh program prioritas, yaitu penguatan moderasi beragama; transformasi digitalisasi layanan; revitalisasi KUA; kemandirian pesantren; *cyber univercity*; pengembangan indeks religius; dan pencanangan tahun toleransi di tahun 2022.
2. Penilaian diawali dengan penilaian pendahuluan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I Pusat. Berdasarkan hasil penilaian pendahuluan tersebut, Eselon I Pusat mengajukan usulan satker-satker yang layak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jemderal sebagai Tim Penilai Internal (TPI). Jumlah satuan kerja yang diajukan penilaian kepada Inspektorat Jenderal adalah 75 satker. Terhadap 75 satker tersebut, Itjen melakukan penilaian internal.
3. Selain pada 75 satker yang diajukan penilaian tersebut, Inspektorat Jenderal juga melakukan penilaian terhadap 9 satker yang telah mendapat predikat WBK. Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan kelayakan 9 satker tersebut untuk mendapat predikat WBBM. Dengan demikian, maka total satker yang dilakukan penilaian internal adalah 84 satker.

4. Untuk memenuhi komponen penilaian survey persepsi korupsi dan kualitas pelayanan publik, Inspektorat Jenderal menggunakan hasil survey yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pelatihan dan Pendidikan Kemenag.
5. Penilaian terhadap 75 satker, menghasilkan 49 satker (65%) layak WBK dan 26 satker (35%) belum layak WBK, dengan rincian sebagai berikut:

No	Eselon I	Kategori Satker	Satker yang Dinilai (Sesuai Usulan Eselon I Pusat)		Layak WBK		Belum Layak WBK	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Setjen	Kanwil	4	5%	1	1%	3	4%
2		Kemenag Kab./Kota	30	40%	25	33%	5	7%
3	Ditjen Pendis	PTKIN	8	11%	5	7%	3	4%
4		MAN	26	35%	15	20%	11	15%
5	Ditjen Bimas Hindu	IAHN	2	3%	0	0%	2	3%
6	Ditjen Bimas Kristen	IAKN	2	3%	0	0%	2	3%
7	Ditjen PHU	Asrama Haji Embarkasi	1	1%	1	1%	0	0%
8	Balitbang & Diklat	BDK	2	3%	2	3%	0	0%
Jumlah			75	100%	49	65%	26	35%

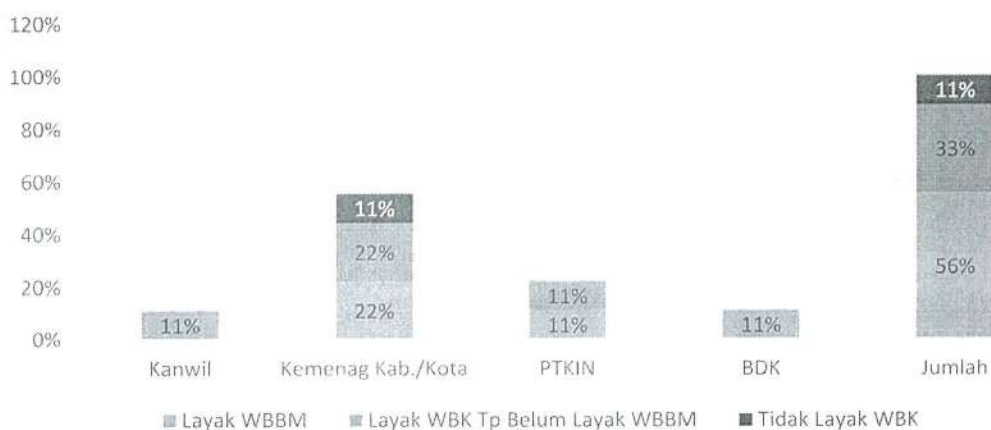
Hasil Penilaian Internal Pembangunan ZI-WBK Kemenag Tahun 2021



6. Penilaian terhadap 9 satker berpredikat WBK, menghasilkan 5 satker (56%) layak WBBM, 4 satker (33%) masih layak WBK namun belum layak WBBM dan 1 satker (4%) tidak lagi layak WBK, dengan rincian sebagai berikut:

No	Eselon I	Kategori Satker	Satker yg Dinilai		Layak WBBM		Layak WBK Tp Belum Layak WBBM		Tidak Layak WBK	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Setjen	Kanwil	1	11%	1	11%	0	0%	0	0%
2		Kemenag Kab./Kota	5	56%	2	22%	2	22%	1	11%
3	Ditjen Pendis	PTKIN	2	22%	1	11%	1	11%	0	0%
4	Balitbang & Diklat	BDK	1	11%	1	11%	0	0%	0	0%
Jumlah			9	100%	5	56%	3	33%	1	11%

**Hasil Penilaian Internal
Pembangunan ZI-WBK/WBBM Kemenag Tahun 2021**



7. Hasil penilaian secara rinci terlampir.

Demikian, selanjutnya mohon arahan.

Inspektur Jenderal,



Deni Suardini



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : pqkYH6

ry

Lampiran I Surat Laporan Hasil
 Penilaian Pembangunan ZI
 WBK/WBBM Kemenag Tahun 2021
 Nomor : R-455/IJ/PS.01.6/05/2021
 Tanggal : 19 Mei 2021

**REKAP HASIL PENILAIAN TIM PENILAI INTERNAL (TPI) ATAS PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS PADA SATUAN KERJA CALON BERPREDIKAT WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI (WBK) KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2021**

NO	SATKER	PROVINSI	NILAI	KESIMPULAN
1	Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah	Jawa Tengah	85,12	Layak WBK
2	Kankemenag Kota Malang	Jawa Timur	94,37	Layak WBK
3	Kankemenag Kab. Purbalingga	Jawa Tengah	91,64	Layak WBK
4	Kankemenag Kab. Gianyar	Bali	90,76	Layak WBK
5	Kankemenag Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	90,04	Layak WBK
6	Kankemenag Kab. Badung	Bali	88,53	Layak WBK
7	Kankemenag Kab. Malang	Jawa Timur	88,43	Layak WBK
8	Kankemenag Kab. Pekalongan	Jawa Tengah	87,86	Layak WBK
9	Kankemenag Kab. Jembrana	Bali	87,45	Layak WBK
10	Kankemenag Kab. Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	87,14	Layak WBK
11	Kankemenag Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	87,13	Layak WBK
12	Kankemenag Kab. Tegal	Jawa Tengah	86,75	Layak WBK
13	Kankemenag Kota Tegal	Jawa Tengah	86,11	Layak WBK
14	Kankemenag Kab. Cilacap	Jawa Tengah	85,22	Layak WBK
15	Kankemenag Kab. Kebumen	Jawa Tengah	84,61	Layak WBK
16	Kankemenag Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	84,58	Layak WBK
17	Kankemenag Kab. Pesisir Selatan	Sumatera Barat	84,09	Layak WBK
18	Kankemenag Kota Tarakan	Kalimantan Utara	83,14	Layak WBK
19	Kankemenag Kab. Banyumas	Jawa Tengah	82,88	Layak WBK
20	Kankemenag Kab. Karimun	Kepulauan Riau	81,49	Layak WBK
21	Kankemenag Kota Salatiga	Jawa Tengah	81,28	Layak WBK
22	Kankemenag Kota Surakarta	Jawa Tengah	80,98	Layak WBK
23	Kankemenag Kab. Kulon Progo	DI Yogyakarta	80,87	Layak WBK
24	Kankemenag Kab. Klaten	Jawa Tengah	80,79	Layak WBK
25	Kankemenag Kab. Rembang	Jawa Tengah	80,76	Layak WBK
26	Kankemenag Kab. Gunung Kidul	DI Yogyakarta	80,46	Layak WBK
27	Asrama Haji Embarkasi Makassar	Sulawesi Selatan	84,32	Layak WBK
28	BDK Jakarta	DKI Jakarta	89,17	Layak WBK
29	BDK Bandung	Jawa Barat	87,50	Layak WBK
30	Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Jawa Barat	86,25	Layak WBK
31	IAIN Kudus	Jawa Tengah	85,69	Layak WBK
32	Fakultas Tarbiyah UIN Alaudin Makassar	Sulawesi Selatan	82,15	Layak WBK

NO	SATKER	PROVINSI	NILAI	KESIMPULAN
33	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang	Jawa Tengah	80,56	Layak WBK
34	IAIN Tulungagung	Jawa Timur	78,63	Layak WBK
35	MAN IC Jambi	Jambi	98,73	Layak WBK
36	MAN IC Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	93,67	Layak WBK
37	MAN IC Sambas	Kalimantan Barat	86,05	Layak WBK
38	MAN 1 Yogyakarta	DI Yogyakarta	85,86	Layak WBK
39	MAN 1 Kota Bukittinggi	Sumatera Barat	84,46	Layak WBK
40	MAN 4 Jakarta	DKI Jakarta	84,27	Layak WBK
41	MAN IC Tanah Laut	Kalimantan Selatan	82,75	Layak WBK
42	MAN 2 Kota Pekanbaru	Riau	82,71	Layak WBK
43	MAN 2 Kulonprogo	DI Yogyakarta	82,48	Layak WBK
44	MAN Salatiga	Jawa Tengah	82,48	Layak WBK
45	MAN IC Gowa	Sulawesi Selatan	81,4	Layak WBK
46	MAN 2 Kota Malang	Jawa Timur	80,58	Layak WBK
47	MAN 2 Kudus	Jawa Tengah	80,06	Layak WBK
48	MAN 1 Jepara	Jawa Tengah	78,26	Layak WBK
49	MAN IC Serpong	Banten	75,83	Layak WBK
50	Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta	DI Yogyakarta	90,31	Belum layak WBK
51	Kanwil Kemenag Prov. Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	81,74	Belum layak WBK
52	Kanwil Kemenag Prov. Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	74,87	Belum layak WBK
53	Kankemenag Kab. Sleman	DI Yogyakarta	88,56	Belum layak WBK
54	Kankemenag Kota Bukittinggi	Sumatera Barat	86,02	Belum layak WBK
55	Kankemenag Kab. Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	75,92	Belum layak WBK
56	Kankemenag Kota Pangkal Pinang	Kepulauan Bangka Belitung	75,65	Belum layak WBK
57	Kankemenag Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	73,53	Belum layak WBK
58	IAIN Pontianak	Kalimantan Barat	84,35	Belum layak WBK
59	Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga	DI Yogyakarta	81,41	Belum layak WBK
60	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jawa Timur	69,93	Belum layak WBK
61	IAHN Gde Pudja Mataram	NTB	72,94	Belum layak WBK
62	IAHN Tampung Penyang Palangkaraya	Kalimantan Tengah	70,39	Belum layak WBK
63	IAKN Ambon	Maluku	78,50	Belum layak WBK
64	IAKN Manado	Sulawesi Utara	69,78	Belum layak WBK
65	MAN IC Bangka Tengah	Kepulauan Bangka Belitung	83,71	Belum layak WBK
66	MAN IC Sorong	Papua Barat	82,53	Belum layak WBK
67	MAN IC Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	80,15	Belum layak WBK
68	MAN IC Padang Pariaman	Sumatera Barat	80,13	Belum layak WBK
69	MAN IC Paser	Kalimantan Timur	77,8	Belum layak WBK
70	MAN IC Gorontalo	Gorontalo	75,37	Belum layak WBK
71	MAN 2 Kuantan Singingi Riau	Riau	74,43	Belum layak WBK
72	MAN IC Pasuruan	Jawa Timur	73,66	Belum layak WBK

NO	SATKER	PROVINSI	NILAI	KESIMPULAN
73	MAN IC Lombok Timur	NTB	72,12	Belum Layak WBK
74	MAN 2 Yogyakarta	DI Yogyakarta	68,68	Belum layak WBK
75	MAN IC Siak	Riau	65,99	Belum layak WBK

Inspektur Jenderal,



Deni Suardini

ry



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>
Token : qh21KZ

Lampiran II Surat Laporan Hasil
Penilaian Pembangunan ZI
WBK/WBBM Kemenag Tahun 2021
Nomor : R-455/IJ/PS.01.6/05/2021
Tanggal : 19 Mei 2021

**REKAP HASIL PENILAIAN TIM PENILAI INTERNAL (TPI) ATAS PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS PADA SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2021**

NO	SATKER	PROVINSI	TAHUN PEROLEHAN WBK	NILAI	KESIMPULAN
1	Kanwil Kemenag Prov. Bali	Bali	2019	93,45	Layak WBBM
2	IAIN Salatiga	Jawa Tengah	2020	92,99	Layak WBBM
3	Kankemenag Kota Singkawang	Kalimantan Barat	2019	92,03	Layak WBBM
4	BDK Semarang	Jawa Tengah	2019	89,73	Layak WBBM
5	Kankemenag Kab. Bantul	DI Yogyakarta	2019	89,40	Layak WBBM
6	Kankemenag Kab. Karangasem	Bali	2018	82,18	Layak WBK, tetapi belum layak WBBM
7	Kankemenag Kab. Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	2017	80,55	Layak WBK, tetapi belum layak WBBM
8	UIN Antasari Banjarmasin	Kalimantan Selatan	2017	80,40	Layak WBK, tetapi belum layak WBBM
9	Kankemenag Kab. Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	2019	85,23	Tidak layak WBK

Inspektur Jenderal,



Deni Suardini



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : BprXOu

Lampiran III Surat Laporan Hasil
Penilaian Pembangunan ZI
WBK/WBBM Kemenag Tahun 2021
Nomor : R-455/IJ/PS.01.6/05/2021
Tanggal : 19 Mei 2021

**LAPORAN HASIL PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka akselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi, yaitu perijinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Untuk melihat kualitas pembangunan Zona Integritas yang telah dilakukan unit kerja, maka dilakukan penilaian internal yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, TPI merupakan tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK atau WBBM. Pada implementasinya, TPI dilaksanakan oleh: a. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); atau b. APIP dan Unit lain yang ditunjuk yang mampu untuk melakukan penilaian dan asistensi pada komponen pengungkit.

TPI mempunyai tugas: a. Melakukan penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh unit kerja; b. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja untuk mendapat predikat Menuju WBK/atau Menuju WBBM; c. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM dan melaporkannya kepada Kementerian.

Pelaksanaan penilaian oleh TPI merupakan tahapan awal sebelum dilakukan revidi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Berbagai upaya dan kegiatan ini diharapkan dapat membantu pimpinan satker dan pemangku kepentingan lainnya dalam bersama-sama menyukseskan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, khususnya di lingkungan Kementerian Agama.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 635 Tahun 2020 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Agama.

C. Tujuan

Tujuan penilaian internal yang dilakukan oleh TPI terhadap pembangunan ZI-WBK/WBBM adalah:

1. Mendapatkan potret dan nilai atas pelaksanaan pembangunan ZI-WBK/WBBM yang telah dilakukan oleh satker/sator/UPT;
2. Membantu satker/sator/UPT dalam melakukan pemetaan dan inventarisasi terkait keberhasilan dan kekurangannya dalam pelaksanaan pembangunan ZI-WBK/WBBM untuk peningkatan pembangunannya.
3. Menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja untuk mendapat predikat Menuju WBK/WBBM.

D. Ruang Lingkup dan Kriteria Penilaian

Ruang lingkup dan kriteria penilaian meliputi:

1. Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE-ZI)
 - a. Indikator-indikator penilaian pelaksanaan pembangunan ZI-WBK/WBBM sebagaimana termaktub pada LKE-ZI yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. Penilaian dilakukan pada komponen pengungkit dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%.
 - c. Untuk pengisian hasil survei berupa indeks persepsi anti korupsi dan indeks pelayanan publik, Inspektorat Jenderal menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
 - d. Terdapat perbedaan bobot nilai pada 3 area komponen pengungkit, yaitu area manajemen perubahan, penataan tata laksana dan penataan SDM antara angka-angka pada LKE-ZI dan Permenpan Nomor 10 Tahun 2019. Atas hal tersebut, sesuai dengan hasil konsultasi dan penyampaian materi dari Kemenpan RB, maka yang digunakan acuan adalah angka-angka pada LKE. Berikut perbedaan angka dimaksud beserta kriteria minimal yang digunakan dalam menentukan kelayakan suatu unit kerja untuk WBK/WBBM:

No	Komponen	Skor		Nilai Minimal WBK (tiap area min 60%)		Nilai Minimal WBBM (tiap area min 75%)	
		Permenpan	LKE	Permenpan	LKE	Permenpan	LKE
A	Pengungkit	60		40	40	48	48
1	Manajemen Perubahan	5	8	3	4,8	3,75	6
2	Penataan Tata Laksana	5	7	3	4,2	3,75	5,25
3	Penataan SDM	15	10	9	6	11,25	7,5

No	Komponen	Skor		Nilai Minimal WBK (tiap area min 60%)		Nilai Minimal WBBM (tiap area min 75%)	
		Permenpan	LKE	Permenpan	LKE	Permenpan	LKE
4	Penguatan Akuntabilitas	10	10	6	6	7,5	7,5
5	Penguatan Pengawasan	15	15	9	9	11,25	11,25
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	10	6	6	7,5	7,5
B	Hasil	40	40				
1	Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN	20	20	18,5	18,5	18,88	18,88
	Survei Persepsi Anti Korupsi	15	15	13,5 (3,6)	13,5 (3,6)	13,88 (3,7)	13,88 (3,7)
	Persentasi TLHP	5	5	5	5	5	5
2	Kualitas Pelayanan Publik	20	20	15 (3,0)	15 (3,0)	17 (3,4)	17 (3,4)
Nilai Total		100	100	75	75	85	85

- e. Pengisian LKE dilakukan secara online pada aplikasi PMPZI Kemenag.
2. Pendalaman pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada satker yang menjadi sasaran penilaian. Pendalaman dilakukan antara lain pada aspek komitmen dan pemahaman pimpinan pada substansi pembangunan Zona Integritas, keterlibatan anggota organisasi pada pembangunan ZI, inovasi yang telah dilaksanakan, prestasi/capaian, pengelolaan media, pengecekan lapangan terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan lain-lain sesuai kondisi satker.
3. Menjadikan data pengawasan yang ada pada Inspektorat Jenderal sebagai pertimbangan dalam melakukan penilaian. Data dimaksud antara lain tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), pengaduan masyarakat, investigasi dan data-data pengawasan lain yang terkorelasi. Data pengawasan ini akan digunakan sebelum dan setelah penilaian lapangan.

4. Tiga komponen penilaian yang telah dijadikan acuan penilaian oleh TPI tersebut dilakukan pembahasan pada rapat panel.

E. Sasaran & Tahapan Penilaian

Penilaian ZI-WBK/WBBM dilaksanakan pada satker-satker di lingkungan Kementerian Agama dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian diawali dengan penilaian pendahuluan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I Pusat. Berdasarkan hasil penilaian pendahuluan tersebut, Eselon I Pusat mengajukan usulan satker-satker yang layak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal sebagai Tim Penilai Internal (TPI). Jumlah satuan kerja yang diajukan penilaian kepada Inspektorat Jenderal adalah 75 satker. Terhadap 75 satker tersebut, Itjen melakukan penilaian internal.
2. Selain pada 75 satker yang diajukan penilaian tersebut, Inspektorat Jenderal juga melakukan penilaian terhadap 9 satker yang telah mendapat predikat WBK. Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan kelayakan 9 satker tersebut untuk mendapat predikat WBBM. Dengan demikian, maka total satker yang dilakukan penilaian internal adalah 84 satker.
3. Untuk memenuhi komponen penilaian survey persepsi korupsi dan kualitas pelayanan publik, Inspektorat Jenderal menggunakan hasil survey yang dilaksanakan oleh Balitbang dan Diklat Kemenag.
4. Tanggal 2 dan 3 Maret 2021 Itjen mengadakan Sosialisasi Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi & Pembangunan Zona Integritas yang diikuti oleh Sekretaris, para Inspektur, para auditor, pejabat structural, pejabat fungsional dan pelaksana pada Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu TPI agar memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan reviu dan verifikasi PMPRB serta penilaian satker calon pilot project ZI WBK/WBBM dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat terinternalisasi pada pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
5. Terhadap 84 satker yang akan dilakukan penilaian, sebelum melakukan penilaian ke lapangan, Itjen melakukan:

- a. Pengecekan, *update*, penagihan, pengoordinasian saldo Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) & Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) satker yang diajukan penilaian.
 - b. Pengecekan dan analisis data saldo Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) internal dan eksternal;
 - c. Pengecekan dan analisis data pengaduan masyarakat;
 - d. Pengecekan dan analisis kasus-kasus pada Inspektorat Investigasi.
 - e. Data pengawasan lainnya.
6. Tanggal 18 Maret 2021 Itjen melaksanakan rapat Koordinasi dan Persiapan TPI Pembangunan ZI WBK/WBBM Kementerian Agama Tahun 2021. Rapat dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan koordinasi dan membahas persiapan mekanisme pelaksanaan penilaian yang akan dilaksanakan TPI, sehingga terjadi penyamaan persepsi antar TPI. Pada forum ini Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pelatihan dan Pendidikan Kemenag juga memaparkan hasil survey persepsi anti korupsi dan survei pelayanan publik.
 7. TPI melakukan penilaian secara luring dan daring.
 8. Dalam melaksanakan penilaian, Itjen mengedepankan pendekatan pendampingan & membantu satker dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada pada satker.
 9. Hasil penilaian lapangan yang dilakukan oleh TPI lalu dibahas dalam dua kali rapat panel. Panel I dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Mei 2021 dan Panel II dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2021. Pada Panel II ini rapat dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal dan dihadiri oleh Sekretaris, Para Inspektur, Ketua Tim TPI, Para Kepala Bagian, Para Kepala Subbagian, Pejabat fungsional dan pelaksana yang terkait dengan pembahasan. Pada Panel II ini diambil keputusan atas hasil penilaian TPI.
 10. Selain penilaian, Itjen berkomitmen akan terus mengawal pembangunan Zona Integritas, baik dengan melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pendampingan kepada satker-satker di lingkungan Kemenag.

BAB II

HASIL PENILAIAN

A. Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil pemantauan, wawancara, survei, pengujian berkas-berkas pendukung, analisis tim penilai, dan dengan memedomani tiga komponen penilaian yang dijadikan acuan penilaian oleh TPI sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya serta hasil pembahasan pada rapat panel I dan II, dapat digambarkan hasil penilaian pembangunan ZI-WBK/WBBM pada Kementerian Agama tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

**REKAP HASIL PENILAIAN TIM PENILAI INTERNAL (TPI) ATAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA SATUAN KERJA
CALON BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORPSI (WBK) KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2021**

No	Satker	Nilai TPI											Kesimpulan	
		a	b	c1	c2	c3	c4	c5	c6	d	e	F		g
1	Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah	85,1	45,4	7,3	4,9	8,2	7,0	12,0	6,0	20,0	15,0	5,0	19,8	Layak WBK
2	Kankemenag Kota Malang	94,4	54,4	7,1	6,5	9,5	9,2	14,3	7,9	40,0	15,0	5,0	20,0	Layak WBK
3	Kankemenag Kab. Purbalingga	91,6	51,6	7,8	4,9	9,9	9,7	10,5	9,0	20,0	15,0	5,0	20,0	Layak WBK
4	Kankemenag Kab. Gianyar	90,8	51,2	7,1	5,8	8,0	9,2	12,8	8,4	39,6	15,0	5,0	19,7	Layak WBK
5	Kankemenag Kota Padang Panjang	90,0	50,6	6,7	4,2	7,4	8,0	14,5	9,8	39,4	15,0	5,0	19,4	Layak WBK
6	Kankemenag Kab. Badung	88,5	48,8	6,4	5,8	7,6	8,8	12,8	7,4	39,7	15,0	5,0	19,7	Layak WBK
7	Kankemenag Kab. Malang	88,4	81,6	6,0	5,7	8,7	9,5	72,6	8,2	39,5	15,0	5,0	19,5	Layak WBK
8	Kankemenag Kab. Pekalongan	87,9	47,9	8,0	4,9	8,9	9,5	9,3	7,4	20,0	15,0	5,0	20,0	Layak WBK
9	Kankemenag Kab. Jembrana	87,5	47,6	6,9	4,9	7,1	8,0	12,4	8,2	20,0	15,0	5,0	15,0	Layak WBK
10	Kankemenag Kab. Bangka Selatan	87,1	47,9	8,0	4,5	8,1	9,2	9,9	8,3	20,0	15,0	5,0	19,2	Layak WBK
11	Kankemenag Kota Jakarta Selatan	87,1	47,9	6,4	5,4	9,4	8,4	11,2	7,2	20,0	15,0	5,0	19,3	Layak WBK
12	Kankemenag Kab. Tegal	86,8	47,0	6,8	4,7	8,0	10,0	10,8	6,8	20,0	15,0	5,0	19,8	Layak WBK
13	Kankemenag Kota Tegal	86,1	46,3	6,2	4,3	7,7	9,8	10,0	8,3	20,0	15,0	5,0	19,9	Layak WBK
14	Kankemenag Kab. Cilacap	85,2	45,3	6,9	4,3	6,6	9,5	9,3	8,7	20,0	15,0	5,0	20,0	Layak WBK
15	Kankemenag Kab. Kebumen	84,6	45,5	5,8	4,4	8,8	8,9	9,0	8,4	20,0	15,0	5,0	19,2	Layak WBK

No	Satker	Nilai TPI											Kesimpulan	
		a	b	c1	c2	c3	c4	c5	c6	d	e	F		g
16	Kankemenag Kota Payakumbuh	84,6	44,9	5,0	4,4	6,6	8,0	11,7	9,3	39,7	15,0	5,0	19,7	Layak WBK
17	Kankemenag Kab. Pesisir Selatan	84,1	44,2	5,8	4,3	6,3	7,0	12,0	8,8	20,0	15,0	5,0	19,9	Layak WBK
18	Kankemenag Kota Tarakan	83,1	43,7	6,1	4,3	7,8	8,6	10,5	6,4	39,5	15,0	5,0	19,5	Layak WBK
19	Kankemenag Kab. Banyumas	82,9	43,3	5,4	4,3	8,5	7,5	9,6	8,1	20,0	15,0	5,0	19,6	Layak WBK
20	Kankemenag Kab. Karimun	81,5	47,0	6,2	5,1	8,4	8,5	11,9	6,9	20,0	15,0	5,0	19,5	Layak WBK
21	Kankemenag Kota Salatiga	81,3	41,6	5,3	4,4	7,3	8,9	9,4	6,3	20,0	15,0	5,0	19,8	Layak WBK
22	Kankemenag Kota Surakarta	81,0	41,3	5,1	4,4	8,0	8,4	9,1	6,2	20,0	15,0	5,0	19,7	Layak WBK
23	Kankemenag Kab. Kulon Progo	80,9	41,3	5,4	4,2	7,5	8,6	9,3	6,3	20,0	15,0	5,0	19,6	Layak WBK
24	Kankemenag Kab. Klaten	80,8	41,1	5,8	4,4	7,2	8,1	9,1	6,5	20,0	15,0	5,0	19,7	Layak WBK
25	Kankemenag Kab. Rembang	80,8	40,9	5,3	4,5	7,8	7,8	9,0	6,4	20,0	15,0	5,0	19,9	Layak WBK
26	Kankemenag Kab. Gunung Kidul	80,5	41,0	6,3	5,0	7,3	7,0	9,4	6,1	20,0	15,0	5,0	19,5	Layak WBK
27	Asrama Haji Embarkasi Makassar	84,3	45,4	6,2	4,7	8,13	8,93	10,9	6,5	20,0	15,0	5,0	19,0	Layak WBK
28	BDK Jakarta	89,2	50,0	6,7	5,8	8,4	8,6	12,1	8,3	20,0	15,0	5,0	19,2	Layak WBK
29	BDK Bandung	87,5	48,0	7,0	5,5	7,3	9,2	10,8	8,3	20,0	15,0	5,0	19,5	Layak WBK
30	Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung	86,3	48,7	6,5	5,5	8,4	8,1	11,7	8,6	20,0	15,0	5,0	17,6	Layak WBK
31	IAIN Kudus	85,7	46,3	6,3	5,5	8,3	8,6	10,5	7,1	20,0	15,0	5,0	19,4	Layak WBK
32	Fakultas Tarbiyah UIN Alaudin Makassar	82,2	45,9	6,4	5,0	7,9	10,0	9,7	7,0	20,0	14,9	5,0	18,3	Layak WBK
33	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang	80,6	45,2	5,6	4,7	8,0	7,6	11,6	7,7	19,9	14,9	5,0	17,5	Layak WBK
34	IAIN Tulungagung	78,6	40,9	6,8	4,7	6,8	6,6	9,9	6,1	20,0	15,0	5,0	17,8	Layak WBK
35	MAN IC Jambi	98,7	58,9	8,0	6,6	9,7	10,0	14,6	10,0	20,0	15,0	5,0	19,8	Layak WBK
36	MAN IC Kota Kendari	93,7	55,6	7,3	6,8	9,8	9,8	12,8	9,2	19,3	14,6	5,0	18,7	Layak WBK
37	MAN IC Sambas	86,0	47,2	7,2	5,3	9,1	8,4	11,1	6,1	19,9	14,9	5,0	18,9	Layak WBK
38	MAN 1 Yogyakarta	85,9	46,0	7,0	6,0	8,2	9,2	9,1	6,6	20,0	15,0	5,0	19,8	Layak WBK
39	MAN 1 Kota Bukittinggi	84,5	46,0	6,6	4,3	7,6	9,5	10,9	7,1	20,0	15,0	5,0	18,5	Layak WBK
40	MAN 4 Jakarta	84,3	47,0	6,1	5,6	8,1	7,6	11,1	8,5	19,9	14,9	5,0	17,4	Layak WBK
41	MAN IC Tanah Laut	82,8	43,6	6,3	4,5	7,9	8,5	9,7	6,7	20,0	15,0	5,0	19,2	Layak WBK
42	MAN 2 Kota Pekanbaru	82,7	44,4	6,0	4,8	8,7	8,9	9,2	6,9	20,0	15,0	5,0	18,3	Layak WBK
43	MAN 2 Kulonprogo	82,5	42,8	7,3	4,2	7,4	8,3	9,1	6,5	39,7	15,0	5,0	19,7	Layak WBK
44	MAN Salatiga	82,5	43,0	7,2	4,9	7,3	7,5	9,4	6,8	20,0	15,0	5,0	19,5	Layak WBK
45	MAN IC Gowa	81,4	43,0	6,4	4,8	7,7	7,5	9,2	7,5	19,4	15,0	5,0	18,4	Layak WBK
46	MAN 2 Kota Malang	80,6	41,7	6,6	4,6	7,2	7,2	9,7	6,5	20,0	15,0	5,0	18,9	Layak WBK

No	Satker	Nilai TPI												Kesimpulan
		a	b	c1	c2	c3	c4	c5	c6	d	e	F	g	
47	MAN 2 Kudus	80,1	40,1	5,4	4,5	7,5	7,0	9,6	6,2	20,0	15,0	5,0	20,0	Layak WBK
48	MAN 1 Jepara	78,3	40,3	5,5	4,5	7,3	7,4	9,5	6,2	19,9	14,9	5,0	18,1	Layak WBK
49	MAN IC Serpong	75,8	60,0	4,8	4,5	7,0	6,6	9,6	6,3	20,0	15,0	5,0	19,0	Layak WBK
50	Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta	90,3	50,7	8,0	6,5	8,6	8,3	10,6	8,7	20,0	15,0	5,0	19,7	Belum layak WBK
51	Kanwil Kemenag Prov. Sumatera Selatan	81,7	42,4	5,8	4,9	6,3	6,3	11,6	7,3	20,0	15,0	5,0	19,0	Belum layak WBK
52	Kanwil Kemenag Prov. Bangka Belitung	74,9	36,3	5,7	3,7	6,1	5,5	9,4	6,1	19,7	15,0	4,7	18,9	Belum layak WBK
53	Kankemenag Kab. Sleman	88,6	48,7	6,9	6,1	7,0	10,0	10,8	7,9	39,9	15,0	5,0	19,9	Belum layak WBK
54	Kankemenag Kota Bukittinggi	86,0	46,4	5,9	4,8	8,8	9,5	10,7	6,7	20,0	15,0	5,0	19,6	Belum layak WBK
55	Kankemenag Kab. Belitung	75,9	60,8	6,4	3,3	8,2	9,5	5,6	4,4	20,0	15,0	5,0	19,5	Belum layak WBK
56	Kankemenag Kota Pangkal Pinang	75,7	36,4	4,9	3,6	7,4	6,1	7,5	6,8	20,0	15,0	5,0	19,3	Belum layak WBK
57	Kankemenag Kota Jakarta Pusat	73,5	34,9	5,5	4,1	7,1	4,3	5,9	8,1	19,9	14,9	5,0	18,7	Belum layak WBK
58	IAIN Pontianak	84,4	50,9	7,6	5,2	9,3	9,8	10,3	8,7	18,5	15,0	3,5	15,0	Belum layak WBK
59	Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga	81,4	43,6	8,0	6,1	6,8	8,8	9,9	4,2	19,9	14,9	5,0	17,9	Belum layak WBK
60	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	69,9	33,2	5,3	4,8	4,1	6,7	7,6	4,7	36,7	14,9	5,0	16,8	Belum layak WBK
61	IAHN Gde Pudja Mataram	72,9	34,2	3,7	3,2	6,8	7,2	6,9	6,4	19,9	14,9	5,0	18,0	Belum layak WBK
62	IAHN Tampung Penyang Palangkaraya	70,4	31,8	6,1	2,9	3,8	8,1	6,6	4,4	38,6	15,0	5,0	18,6	Belum layak WBK
63	IAKN Ambon	78,5	39,1	6,3	5,7	6,7	8,8	7,1	4,5	20,0	15,0	5,0	19,5	Belum layak WBK
64	IAKN Manado	69,8	37,7	4,4	4,9	7,5	9,1	7,5	4,4	13,8	13,8	0,0	18,4	Belum layak WBK
65	MAN IC Bangka Tengah	83,7	45,1	8,0	4,3	8,4	9,2	7,9	7,3	20,0	15,0	5,0	18,7	Belum layak WBK
66	MAN IC Sorong	82,5	42,9	5,8	4,9	8,4	8,3	8,9	6,3	20,0	15,0	5,0	19,7	Belum layak WBK
67	MAN IC Ogan Komering Ilir	80,2	40,8	6,4	4,0	5,6	8,5	9,3	7,0	20,0	15,0	5,0	19,4	Belum layak WBK
68	MAN IC Padang Pariaman	80,1	41,5	5,8	3,6	9,0	4,9	12,0	6,2	19,9	14,9	5,0	18,8	Belum layak WBK
69	MAN IC Paser	77,8	38,4	7,6	3,6	7,7	6,9	8,7	4,09	39,4	15,0	5,0	19,4	Belum layak WBK
70	MAN IC Gorontalo	75,4	37,0	6,7	4,7	7,9	8,4	3,6	6,0	38,0	15,0	5,0	18,1	Belum layak WBK
71	MAN 2 Kuantan Singingi Riau	74,4	34,6	3,6	3,2	5,6	7,0	8,9	6,3	20,0	15,0	5,0	19,9	Belum layak WBK
72	MAN IC Pasuruan	73,7	34,8	6,6	3,6	7,2	6,5	4,4	6,6	38,9	15,0	5,0	18,9	Belum layak WBK
73	MAN IC Lombok Timur	72,1	34,9	5,4	2,8	7,6	7,0	5,6	6,5	19,7	14,7	5,0	18,8	Belum Layak WBK
74	MAN 2 Yogyakarta	68,7	28,8	0,5	2,0	3,0	10,0	5,5	7,9	20,0	15,0	5,0	19,9	Belum layak WBK
75	MAN IC Siak	66,0	26,8	3,8	3,6	4,5	3,6	7,8	3,6	20,0	15,0	5,0	19,2	Belum layak WBK

Keterangan:

1. a = Nilai Total
2. b = Nilai Pengungkit
3. c1 = Nilai Manajemen Perubahan
4. c2 = Nilai Penataan Tata Laksana
5. c3 = Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM
6. c4 = Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7. c5 = Nilai Penguatan Pengawasan
8. c6 = Nilai Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

9. d = Nilai Komponen hasil Terwujudnya Pemerintah yang Bersih KKN.
10. e = Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi
11. f = Nilai Persentasi TLHP
12. g = Nilai erwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
13. Warna kuning menunjukkan nilai belum memenuhi batas minimal
14. Rincian nilai tiap item pertanyaan dapat diunduh dari LKE ZI pada aplikasi PMPZI Kemenag.

**REKAP HASIL PENILAIAN TIM PENILAI INTERNAL (TPI) ATAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA SATUAN KERJA
BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORPSI (WBK) KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2021**

NO	SATKER	PROVINSI	TAHUN PEROLEHAN PREDIKAT WBK	NILAI TPI KELAYAKAN WBBM												KESIMPULAN
				a	b	c1	c2	c3	c4	c5	c6	d	e	f	g	
1	Kanwil Kemenag Prov. Bali	Bali	2019	93,5	53,6	7,6	5,6	8,0	9,7	13,3	9,4	20,0	15,0	5,0	19,9	Layak WBBM
2	IAIN Salatiga	Jawa Tengah	2020	93,0	53,5	7,8	6,8	9,8	9,7	11,4	8,1	20,0	15,0	5,0	19,6	Layak WBBM
3	Kankemenag Kota Singkawang	Kalimantan Barat	2019	92,0	52,0	8,0	5,5	8,8	10,0	11,6	8,7	20,0	15,0	5,0	20,0	Layak WBBM
4	BDK Semarang	Jawa Tengah	2019	89,7	48,0	7,1	5,6	8,0	9,7	11,6	8,2	20,0	15,0	5,0	19,7	Layak WBBM
5	Kankemenag Kab. Bantul	DI Yogyakarta	2019	89,4	49,7	7,8	5,3	8,4	9,5	11,3	7,6	20,0	15,0	5,0	19,7	Layak WBBM
6	Kankemenag Kab. Karangasem	Bali	2018	82,2	42,4	7,0	4,5	8,1	7,1	9,1	6,6	39,8	15,0	5,0	19,8	Layak WBK, tetapi belum layak WBBM
7	Kankemenag Kab. Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	2017	80,6	41,0	5,2	5,1	6,3	7,4	9,0	7,9	39,6	15,0	5,0	19,6	Layak WBK, tetapi belum layak WBBM
8	UIN Antasari Banjarmasin	Kalimantan Selatan	2017	80,4	44,1	6,3	4,3	8,1	8,3	10,4	6,8	18,9	13,9	5,0	17,5	Layak WBK, tetapi belum layak WBBM
9	Kankemenag Kab. Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	2019	85,2	45,7	6,2	4,7	7,7	8,6	10,9	7,5	17,8	14,9	2,9	19,7	Tidak layak WBK

Keterangan:

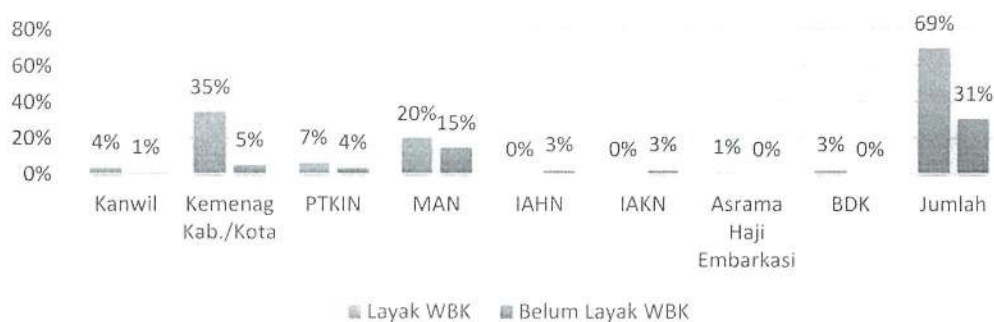
1. a = Nilai Total
2. b = Nilai Pengungkit
3. c1 = Nilai Manajemen Perubahan
4. c2 = Nilai Penataan Tata Laksana
5. c3 = Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM
6. c4 = Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7. c5 = Nilai Penguatan Pengawasan
8. c6 = Nilai Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
9. d = Nilai Komponen hasil Terwujudnya Pemerintah yang Bersih KKN.
10. e = Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi
11. f = Nilai Persentasi TLHP
12. g = Nilai erwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kepada Masyarakat
13. Warna kuning menunjukkan nilai belum memenuhi batas minimal nilai WBBM
14. Rincian nilai tiap item pertanyaan dapat diunduh dari LKE ZI pada aplikasi PMPZI Kemenag.

Sebagaimana tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Penilaian terhadap 75 satker, menghasilkan 49 satker (65%) layak WBK dan 26 satker (35%) belum layak WBK, dengan rincian sebagai berikut:

No	Eselon I	Kategori Satker	Satker yang Dinilai (Sesuai Usulan Eselon I Pusat)		Layak WBK		Belum Layak WBK	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Setjen	Kanwil	4	5%	1	1%	3	4%
2		Kemenag Kab./Kota	30	40%	25	33%	5	7%
3	Ditjen Pendis	PTKIN	8	11%	5	7%	3	4%
4		MAN	26	35%	15	20%	11	15%
5	Ditjen Bimas Hindu	IAHN	2	3%	0	0%	2	3%
6	Ditjen Bimas Kristen	IAKN	2	3%	0	0%	2	3%
7	Ditjen PHU	Asrama Haji Embarkasi	1	1%	1	1%	0	0%
8	Balitbang & Diklat	BDK	2	3%	2	3%	0	0%
Jumlah			75	100%	49	65%	26	35%

Hasil Penilaian Internal Pembangunan ZI-WBK Kemenag Tahun 2021



2. Penilaian terhadap 9 satker berpredikat WBK, menghasilkan 5 satker (56%) layak WBBM, 4 satker (33%) masih layak WBK namun belum layak WBBM dan 1 satker (4%) tidak lagi layak WBK, dengan rincian sebagai berikut:

No	Eselon I	Kategori Satker	Satker yg Dinilai		Layak WBBM		Layak WBK Tp Belum Layak WBBM		Tidak Layak WBK	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Setjen	Kanwil	1	11%	1	11%	0	0%	0	0%
2		Kemenag Kab./Kota	5	56%	2	22%	2	22%	1	11%
3	Ditjen Pendis	PTKIN	2	22%	1	11%	1	11%	0	0%
4	Balitbang & Diklat	BDK	1	11%	1	11%	0	0%	0	0%
Jumlah			9	100%	5	56%	3	33%	1	11%



- Rincian nilai tiap item pertanyaan tersebut dapat diunduh oleh masing-masing satker dari LKE ZI pada aplikasi PMPZI Kemenag.

B. Permasalahan

Secara umum, permasalahan-permasalahan yang ditemukan, antara lain:

- Pemahaman satker terhadap pembangunan ZI belum utuh di awal TPI masuk, sehingga berakibat pada pelaksanaan ZI yang kurang optimal.
- Kurangnya pembinaan/pendampingan/sosialisasi (kuantitas dan atau kualitas). Sosialisasi yang dilakukan baru pada tataran normatif, belum sampai pada tataran bagaimana menginternalisasi ZI dan belum sampai pada tataran teknik.

3. Evidence yang disajikan oleh satker tidak *update*/tidak ditemukan/tidak rapi/tidak lengkap/tidak sesuai dengan substansi pertanyaan dalam LKE.
4. Kurang kuatnya komitmen beberapa pimpinan satker terhadap pembangunan ZI-WBK/WBBM.
5. Pembangunan ZI belum dilakukan oleh seluruh unsur organisasi. Baru sebagian anggota organisasi yang terlibat pada pembangunan ZI.
6. Pembangunan ZI belum dilakukan secara sistemik dan substantif, sehingga masih terkesan mengejar nilai, berorientasi pada penyiapan evidence, bahkan pembuatan evidence dilakukan secara dadakan ketika menjelang/saat penilaian.
7. Belum terdapat pola dan program yang memadai untuk menjadikan satker-satker yang sudah mendapatkan predikat WBK atau inovasi-inovasi/keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh satker-satker tertentu sebagai percontohan bagi satker lainnya dan replikasi belum dilakukan secara masif.
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI belum dilakukan secara berkala. Keterlibatan pimpinan secara aktif dalam monev pelaksanaan pembangunan ZI masih belum memadai. Sistem pengendalian dan pengawasan yang diterapkan belum maksimal.
9. Penyiapan satker-satker dalam penilaian tidak dilakukan dalam rentang waktu yang memadai (dadakan).
10. Terbatasnya sumber daya yang dimiliki, baik oleh satker maupun pada eselon I Pusat. Keterbatasan meliputi anggaran, sarana prasarana maupun SDM.
11. Sarana prasarana pelayanan publik yang tidak terstandar antar satuan kerja. Terdapat beberapa satker yang sarana prasasaranya perlu peningkatan untuk ukuran satker percontohan, misalnya tempat parkir yang terbatas, belum tersedianya ruang laktasi, ruang dan lokasi pelayanan kurang ramah difabel, dll.
12. Beberapa satker terkendala dengan kepemilikan lahan dan gedung perkantoran yang digunakan adalah milik Pemerintah daerah, sehingga

satker tidak leluasa, bahkan sangat terbatas kewenangan untuk mengelolanya.

13. Keterbatasan inovasi (penentuan dan pengemasan) yang unggul dan berciri khas Kemenag dan belum bisa menjawab harapan *stakeholder*.
14. Beberapa satker telah memiliki inovasi yang bagus, namun masih perlu dikemas secara maksimal, a.l. belum seluruhnya dapat menyajikan output/outcome yang berdampak langsung pada stakeholder.
15. Pengelolaan terhadap media untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan *stakeholder* eksternal/masyarakat belum dilakukan secara efektif dan belum berorientasi/didominasi pelayanan publik.
16. Belum terdapat *reward* yang memadai bagi satker yang secara giat melaksanakan pembangunan ZI dan *punishment* bagi sebaliknya.
17. Minimnya satker-satker yang secara geografis dekat dengan Eselon I Pusat (DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat) yang layak diajukan untuk predikat WBK.
18. Beberapa satker dalam pengisian LKE dan ketersediaan inovasi mendapatkan nilai yang bagus, namun dinyatakan belum layak WBK karena terdapat permasalahan dari sisi hasil pengawasan (terdapat kasus-kasus hukum/yang menciderahi integritas).

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. 49 satker yang layak untuk diajukan evaluasi/review ke Kemenpan RB sebagai calon satker yang mendapat predikat WBK
2. 5 satker yang telah berpredikat WBK yang layak diajukan untuk mendapat predikat WBBM.
3. 4 satker yang mendapat predikat WBK, namun tidak diajukan review ke TPN untuk kategori WBBM karena belum memenuhi syarat.
4. 1 satker yang mendapat predikat WBK tahun 2019 yang bukan saja belum layak diajukan review ke TPN untuk kategori WBBM, namun juga tidak dapat lagi memenuhi nilai minimal untuk kategori WBK.

B. Saran

Dalam rangka akselerasi pembangunan ZI-WBK/WBBM pada Kemenag, disarankan hal-hal berikut:

1. Mengoptimalkan keterlibatan dan dukungan dari Eselon I dan Kanwil Kemenag Provinsi terkait dalam pembangunan ZI pada satker di bawahnya. Hal ini antara lain dengan peningkatan pembinaan/pendampingan/sosialisasi kepada satker secara berjenjang. Mengingat keterbatasan sumber daya pada masing-masing eselon I Pusat dan Kanwil, maka dapat dilakukan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaannya, termasuk dengan Inspektorat Jenderal sebagai TPI, sehingga pembinaan dapat dilakukan secara masif dan berorientasi pada hasil. Pembinaan agar dilakukan bukan sekedar sosialisasi hal-hal yang sifatnya normatif, tetapi lebih mendalam dan substantif, antara lain pada implementasi/internalisasi ZI dan sampai pada tataran teknik.
2. Penyiapan satker-satker dilakukan dalam rentang waktu yang memadai (tidak dadakan, melainkan sudah terprogram berdasarkan hasil *mapping* satker-satker yang akan/dapat dikandidatkan untuk diajukan penilaian ke Kemenpan RB).
3. Mengalokasikan dukungan sumber daya yang memadai, baik anggaran, SDM, sarana prasarana, maupun lainnya. Terhadap satker-satker yang

telah mendapat predikat WBK agar Sekretariat Jenderal mengalokasikan dukungan sumber daya untuk meningkatkan predikat menuju WBBM.

4. Mendorong peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik di lingkungan Kemenag maupun di luar lingkungan Kemenag dalam pembangunan ZI WBK-WBBM, antara lain dengan melakukan studi banding dengan lembaga lain.
5. Pemberian *reward* bagi satker yang secara giat melaksanakan pembangunan ZI-WBK/WBBM dan *punishment* bagi satker yang mengabaikannya.
6. Menjadikan satker-satker yang sudah mendapatkan predikat WBK atau inovasi-inovasi/keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh satker-satker tertentu sebagai percontohan bagi satker lainnya.
7. Peningkatan komitmen pimpinan satker terhadap pembangunan ZI-WBK/WBBM, antara lain menjadikan target ZI-WBK/WBBM dalam perjanjian kinerja dan menjadikannya sebagai salah satu unsur/pertimbangan dalam pengangkatan/mutasi jabatan.
8. Meningkatkan pengendalian pembangunan ZI, baik dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berjenjang, peningkatan pengawasan, dll.
9. Peningkatan pengelolaan terhadap media untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan *stakeholder* eksternal/masyarakat yang berorientasi pada pelayanan publik.
10. Mendekatkan diri dengan harapan pengguna layanan.
11. Mendorong semua satker untuk melakukan akselerasi pembangunan ZI.
12. Terhadap akselerasi pembangunan ZI pada Kanwil DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, agar eselon I terkait melakukan *treatment* khusus, sesuai kondisi masing-masing satker.

Jakarta, 19 Mei 2021

Inspektru Jenderal,



Deni Suardini



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : x8b7JB

Lampiran IV Surat Laporan Hasil
Penilaian Pembangunan ZI
WBK/WBBM Kemenag Tahun 2021
Nomor : R-455/IJ/PS.01.6/05/2021
Tanggal : 19 Mei 2021

IKHTISAR HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP 84 SATKER/UPT KEMENTERIAN AGAMA CALON WBK/WBBM TAHUN 2021

Survei persepsi korupsi merupakan survei yang dilakukan untuk menilai tingkat persepsi korupsi masyarakat terhadap satuan kerja yang dilakukan penilaian. Hasil survei ini menjadi salah satu indikator terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Adapun survei persepsi kualitas pelayanan merupakan survei yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada satuan kerja yang dilakukan penilaian.

Survei persepsi korupsi dan survei persepsi kualitas pelayanan dilakukan secara *online* oleh Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dari tanggal 1 Januari s.d. 14 Februari 2021.

Skala yang digunakan adalah skala likert dengan skala 6 dimana nilai terbesar 6 dan nilai terkecil 1, mengacu pada survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi korupsi yang dilakukan oleh BPS. Hasil dari nilai tersebut kemudian dikonversi menjadi skala 4 untuk memenuhi ketentuan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Agama.

Berikut hasil survei persepsi korupsi dan survei persepsi kualitas pelayanan dimaksud:

I. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Dalam skala 4 secara keseluruhan nilai IPAK yang diperoleh setiap satker diikhtisarkan sebagai berikut:

A. Satuan Kerja Calon Wilayah Bebas dari Korupsi (Satker calon WBK)

IPAK Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

No	Nama Satker	IPAK	Passing Grade	Keterangan
1	Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta	3,99	3,60	<i>Passed</i>
2	Kanwil Kemenag Provinsi Bangka Belitung	4,00	3,60	<i>Passed</i>
3	Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah	3,99	3,60	<i>Passed</i>
4	Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan	4,00	3,60	<i>Passed</i>

IPAK Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten

No	Nama Satker	IPAK	Passing Grade	Keterangan
1	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung	4,00	3,60	<i>Passed</i>
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan	4,00	3,60	<i>Passed</i>
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	4,00	3,60	<i>Passed</i>
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung	4,00	3,60	<i>Passed</i>
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap	4,00	3,60	<i>Passed</i>
6	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar	3,99	3,60	<i>Passed</i>
7	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	4,00	3,60	<i>Passed</i>
8	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana	4,00	3,60	<i>Passed</i>
9	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun	4,00	3,60	<i>Passed</i>
10	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen	3,99	3,60	<i>Passed</i>
11	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten	4,00	3,60	<i>Passed</i>
12	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	4,00	3,60	<i>Passed</i>
13	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang	4,00	3,60	<i>Passed</i>
14	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan	4,00	3,60	<i>Passed</i>
15	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	4,00	3,60	<i>Passed</i>
16	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	4,00	3,60	<i>Passed</i>
17	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang	4,00	3,60	<i>Passed</i>

No	Nama Satker	IPAK	Passing Grade	Keterangan
18	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	4,00	3,60	Passed
19	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal	3,99	3,60	Passed

IPAK Satker Kantor Kementerian Agama Kota

No	Nama Satker	IPAK	Passing Grade	Keterangan
1	Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	4,00	3,60	Passed
2	Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat	3,98	3,60	Passed
3	Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan	3,99	3,60	Passed
4	Kantor Kementerian Agama Kota Malang	3,99	3,60	Passed
5	Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang	4,00	3,60	Passed
6	Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang	4,00	3,60	Passed
7	Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh	4,00	3,60	Passed
8	Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga	3,99	3,60	Passed
9	Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta	4,00	3,60	Passed
10	Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan	3,99	3,60	Passed
11	Kantor Kementerian Agama Kota Tegal	4,00	3,60	Passed

IPAK UPT Asrama Haji

No	Nama Satker	IPAK	Passing Grade	Keterangan
1	Asrama Haji Embarkasi Makassar	3,99	3,60	Passed

IPAK Satker Balai Diklat Keagamaan

No	Nama Satker	IPAK	Passing Grade	Keterangan
1	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	4,00	3,60	Passed
2	Balai Diklat Keagamaan Bandung	4,00	3,60	Passed

IPAK Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri

No	Nama Satker	IPAK	Passing Grade	Keterangan
1	Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang	3,98	3,60	Passed

No	Nama Satker	IPAK	Passing Grade	Keterangan
2	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	3,98	3,60	<i>Passed</i>
3	Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung	3,99	3,60	<i>Passed</i>
4	Fakultas Tarbiyah UIN Sultan Alauddin Makassar	3,99	3,60	<i>Passed</i>
5	Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	3,99	3,60	<i>Passed</i>
6	IAHN Gde Pudja Mataram	3,98	3,60	<i>Passed</i>
7	IAHN Tampung Penyang Palangkaraya	3,99	3,60	<i>Passed</i>
8	IAIN Kudus	4,00	3,60	<i>Passed</i>
9	IAIN Pontianak	3,99	3,60	<i>Passed</i>
10	IAIN Tulungagung	3,99	3,60	<i>Passed</i>
11	IAKN Ambon	3,99	3,60	<i>Passed</i>
12	IAKN Manado	3,99	3,60	<i>Passed</i>

IPAK Satker Madrasah

No	Nama Satker	IPAK	Passing Grade	Keterangan
1	MAN 1 Jepara	3,98	3,60	<i>Passed</i>
2	MAN 1 Kota Bukittinggi	3,99	3,60	<i>Passed</i>
3	MAN 1 Yogyakarta	4,00	3,60	<i>Passed</i>
4	MAN 2 Kota Malang	4,00	3,60	<i>Passed</i>
5	MAN 2 Kota Pekanbaru	4,00	3,60	<i>Passed</i>
6	MAN 2 Kuantan Singingi	3,99	3,60	<i>Passed</i>
7	MAN 2 Kudus	4,00	3,60	<i>Passed</i>
8	MAN 2 Kulonprogo	4,00	3,60	<i>Passed</i>
9	MAN 2 Yogyakarta	4,00	3,60	<i>Passed</i>
10	MAN 4 Jakarta	3,98	3,60	<i>Passed</i>
11	MAN IC Bangka Tengah	3,99	3,60	<i>Passed</i>
12	MAN IC Gorontalo	3,99	3,60	<i>Passed</i>
13	MAN IC Gowa	3,99	3,60	<i>Passed</i>
14	MAN IC Jambi	4,00	3,60	<i>Passed</i>
15	MAN IC Kota Kendari	3,98	3,60	<i>Passed</i>
16	MAN IC Lombok Timur	3,91	3,60	<i>Passed</i>
17	MAN IC Ogan Komering Ilir	4,00	3,60	<i>Passed</i>
18	MAN IC Padang Pariaman	3,98	3,60	<i>Passed</i>
19	MAN IC Paser	4,00	3,60	<i>Passed</i>
20	MAN IC Pasuruan	4,00	3,60	<i>Passed</i>
21	MAN IC Sambas	3,98	3,60	<i>Passed</i>
22	MAN IC Serpong	4,00	3,60	<i>Passed</i>
23	MAN IC Siak	4,00	3,60	<i>Passed</i>

No	Nama Satker	IPAK	Passing Grade	Keterangan
24	MAN IC Sorong	4,00	3,60	<i>Passed</i>
25	MAN IC Tanah Laut	4,00	3,60	<i>Passed</i>
26	MAN Salatiga	4,00	3,60	<i>Passed</i>

B. IPAK Satker Calon Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

No	Nama Satker	IPAK	Passing Grade	Keterangan
1	BDK Semarang	4,00	3,70	<i>Passed</i>
2	IAIN Salatiga	3,99	3,70	<i>Passed</i>
3	Kab. Bantul	4,00	3,70	<i>Passed</i>
4	Kab. Karangasem	4,00	3,70	<i>Passed</i>
5	Kab. Musi Banyuasin	4,00	3,70	<i>Passed</i>
6	Kab. Ogan Komering Ilir	3,98	3,70	<i>Passed</i>
7	Kanwil Kemenag Prov. Bali	4,00	3,70	<i>Passed</i>
8	Kota Singkawang	4,00	3,70	<i>Passed</i>
9	UIN Banjarmasin	3,98	3,70	<i>Passed</i>

II. Indeks Kualitas Pelayanan (IKP)

Dalam skala 4 secara keseluruhan nilai IKP yang diperoleh setiap satker diikhtisarkan sebagai berikut:

A. Satuan Kerja Calon Wilayah Bebas dari Korupsi (Satker calon WBK)

IKP Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

No	Nama Satker	IKP	Passing Grade	Keterangan
1	Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta	3,93	3,00	<i>Passed</i>
2	Kanwil Kemenag Provinsi Bangka Belitung	3,78	3,00	<i>Passed</i>
3	Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah	3,96	3,00	<i>Passed</i>
4	Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan	3,87	3,00	<i>Passed</i>

IKP Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten

No	Nama Satker	IKP	Passing Grade	Keterangan
1	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung	3,94	3,00	<i>Passed</i>
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan	3,84	3,00	<i>Passed</i>

No	Nama Satker	IKP	Passing Grade	Keterangan
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	3,91	3,00	<i>Passed</i>
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung	3,89	3,00	<i>Passed</i>
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap	3,99	3,00	<i>Passed</i>
6	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar	3,93	3,00	<i>Passed</i>
7	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	3,90	3,00	<i>Passed</i>
8	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana	3,98	3,00	<i>Passed</i>
9	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun	3,89	3,00	<i>Passed</i>
10	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen	3,84	3,00	<i>Passed</i>
11	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten	3,93	3,00	<i>Passed</i>
12	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	3,91	3,00	<i>Passed</i>
13	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang	3,89	3,00	<i>Passed</i>
14	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan	3,99	3,00	<i>Passed</i>
15	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	3,98	3,00	<i>Passed</i>
16	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	4,00	3,00	<i>Passed</i>
17	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang	3,98	3,00	<i>Passed</i>
18	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	3,98	3,00	<i>Passed</i>
19	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal	3,95	3,00	<i>Passed</i>

IKP Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota

No	Nama Satker	IKP	Passing Grade	Keterangan
1	Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	3,92	3,00	<i>Passed</i>
2	Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat	3,74	3,00	<i>Passed</i>
3	Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan	3,86	3,00	<i>Passed</i>
4	Kantor Kementerian Agama Kota Malang	4,00	3,00	<i>Passed</i>
5	Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang	3,88	3,00	<i>Passed</i>
6	Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang	3,86	3,00	<i>Passed</i>
7	Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh	3,93	3,00	<i>Passed</i>
8	Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga	3,95	3,00	<i>Passed</i>
9	Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta	3,94	3,00	<i>Passed</i>
10	Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan	3,90	3,00	<i>Passed</i>
11	Kantor Kementerian Agama Kota Tegal	3,97	3,00	<i>Passed</i>

IKP UPT Asrama Haji

No	Nama UPT	IKP	Passing Grade	Keterangan
1	Asrama Haji Embarkasi Makassar	3,80	3,00	<i>Passed</i>

IKP Balai Diklat Keagamaan

No	Nama Satker	IKP	Passing Grade	Keterangan
1	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	3,84	3,00	<i>Passed</i>
2	Balai Diklat Keagamaan Bandung	3,90	3,00	<i>Passed</i>

IKP Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri

No	Nama Satker	IKP	Passing Grade	Keterangan
1	Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang	3,49	3,00	<i>Passed</i>
2	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	3,36	3,00	<i>Passed</i>
3	Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung	3,51	3,00	<i>Passed</i>

No	Nama Satker	IKP	Passing Grade	Keterangan
4	Fakultas Tarbiyah UIN Sultan Alauddin Makassar	3,66	3,00	<i>Passed</i>
5	Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	3,57	3,00	<i>Passed</i>
6	IAHN Gde Pudja Mataram	3,76	3,00	<i>Passed</i>
7	IAHN Tampung Penyang Palangkaraya	3,72	3,00	<i>Passed</i>
8	IAIN Kudus	3,87	3,00	<i>Passed</i>
9	IAIN Pontianak	3,45	3,00	<i>Passed</i>
10	IAIN Tulungagung	3,55	3,00	<i>Passed</i>
11	IAKN Ambon	3,89	3,00	<i>Passed</i>
12	IAKN Manado	3,67	3,00	<i>Passed</i>

IKP Satker Madrasah Aliyah Negeri

No	Nama Satker	IKP	Passing Grade	Keterangan
1	MAN 1 Jepara	3,61	3,00	<i>Passed</i>
2	MAN 1 Kota Bukittinggi	3,70	3,00	<i>Passed</i>
3	MAN 1 Yogyakarta	3,96	3,00	<i>Passed</i>
4	MAN 2 Kota Malang	3,77	3,00	<i>Passed</i>
5	MAN 2 Kota Pekanbaru	3,66	3,00	<i>Passed</i>
6	MAN 2 Kuantan Singingi	3,97	3,00	<i>Passed</i>
7	MAN 2 Kudus	4,00	3,00	<i>Passed</i>
8	MAN 2 Kulonprogo	3,94	3,00	<i>Passed</i>
9	MAN 2 Yogyakarta	3,97	3,00	<i>Passed</i>
10	MAN 4 Jakarta	3,47	3,00	<i>Passed</i>
11	MAN IC Bangka Tengah	3,73	3,00	<i>Passed</i>
12	MAN IC Gorontalo	3,61	3,00	<i>Passed</i>
13	MAN IC Gowa	3,68	3,00	<i>Passed</i>
14	MAN IC Jambi	3,96	3,00	<i>Passed</i>
15	MAN IC Kota Kendari	3,79	3,00	<i>Passed</i>
16	MAN IC Lombok Timur	3,51	3,00	<i>Passed</i>
17	MAN IC Ogan Komering Ilir	3,87	3,00	<i>Passed</i>
18	MAN IC Padang Pariaman	3,75	3,00	<i>Passed</i>
19	MAN IC Paser	3,88	3,00	<i>Passed</i>
20	MAN IC Pasuruan	3,78	3,00	<i>Passed</i>
21	MAN IC Sambas	3,78	3,00	<i>Passed</i>
22	MAN IC Serpong	3,80	3,00	<i>Passed</i>
23	MAN IC Siak	3,84	3,00	<i>Passed</i>
24	MAN IC Sorong	3,93	3,00	<i>Passed</i>
25	MAN IC Tanah Laut	3,84	3,00	<i>Passed</i>

No	Nama Satker	IKP	<i>Passing Grade</i>	Keterangan
26	MAN Salatiga	3,89	3,00	<i>Passed</i>

B. IKP Satker Calon Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

No	Nama Satker	IKP	<i>Passing Grade</i>	Keterangan
1	BDK Semarang	3,93	3,40	<i>Passed</i>
2	IAIN Salatiga	3,91	3,40	<i>Passed</i>
3	Kab. Bantul	3,94	3,40	<i>Passed</i>
4	Kab. Karangasem	3,95	3,40	<i>Passed</i>
5	Kab. Musi Banyuasin	3,91	3,40	<i>Passed</i>
6	Kab. Ogan Komering Ilir	3,93	3,40	<i>Passed</i>
7	Kanwil Kemenag Prov. Bali	3,98	3,40	<i>Passed</i>
8	Kota Singkawang	4,00	3,40	<i>Passed</i>
9	UIN Banjarmasin	3,49	3,40	<i>Passed</i>